

**ANALISIS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DALAM
REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH
DAERAH KOTA MEDAN
Pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan**

TUGAS AKHIR

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.AK)
Program Studi Akuntansi*



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh :

NAMA : LIZA
NPM : 2105170149
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
KONSENTRASI : AKUNTANSI MANAJEMEN

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2026**



PENGESAHAN UJIAN TUGAS AKHIR

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 18 April 2026, pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama : LIZA
N P M : 2105170149
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI MANAJEMEN
Judul T. Akhir : ANALISIS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DALAM REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KOTA MEDAN (PADA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN)

Dinyatakan : (A-) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIMPENGUJI

Pengji I

Dr. DAIRANI, S.E., M.Si

Pengji II

DIAN YUSTRIAN, S.E., M.Si

Pembimbing Tugas Akhir

KHAIRUL ANWAR PULUNGAN, S.E., M.Si

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. RADEMAN, S.E., M.Si

Sekretaris

Prof. Dr. HASRUDY TANJUNG, S.E., M.Si





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mulditar Basri No. 3 Medan Telp. 061-6624567 Kode Pos 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

TUGAS AKHIR ini disusun oleh :

Nama : LIZA
N.P.M : 2105170149
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI MANAJEMEN
Judul Tugas Akhir : ANALISIS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DALAM REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH
DAERAH KOTA MEDAN (PADA DINAS KETAHANAN
PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN)

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian
mempertahankan Tugas Akhir.

Medan, April 2026

Pembimbing Tugas Akhir

KHAIRUL ANWAR PULUNGAN, S.E., M.Si.

Diketahui/Disetujui

Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

NABILA DWI AGINTHA, S.E., M.Sc.

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

DR. RADIMAN, S.E., M.Si.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mulhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : LIZA
N P M : 2105170149
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI MANAJEMEN
Judul Penelitian : ANALISIS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DALAM REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KOTA MEDAN (Pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan)

| Tanggal | Hasil Evaluasi | Tanggal | Paraf Dosen |
|-------------------------------|--|------------|-------------|
| BAB 1 | - Partikan data yg akandilel/A terselui - Bandingkan grand teori penerapan - Penjelasan masalah penelitian | 27/08/2025 | |
| BAB 2 | - Grand teori rentung s/a d s/p - teori rentung variabel yg diteinte | 12/09/2025 | |
| BAB 3 | - Perbaiki waktu penelitian - Selesaikan data | 16/09/2025 | |
| BAB 4 | - Perdalam teori rentung anggaran. - Perubahan konsep baru mak | 6/04/2026 | |
| BAB 5 | - Kesimpulan dan saran semaikan dgn pembuktian | 7/04/2026 | |
| Daftar Pustaka | - Semai mandelky | 7/04/2026 | |
| Persetujuan Sidang Meja Hijau | - Act untuk Meja Hijau | 7/04/2026 | |

Ketua Program Studi Akuntansi

(NABILLA DWI AGINTHA S.E., M.Sc)

Medan, April 2026
Diketahui / Disetujui
Dosen Pembimbing

(KHAIRUL ANWAR PULUNGAN, S.E., M.S)

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : LIZA

N.P.M : 2105170149

Program Studi : AKUNTANSI

Konsentrasi : AKUNTANSI MANAJEMEN

**Judul Skripsi : ANALISIS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DALAM REALISASI
ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KOTA MEDAN (PADA
DINAS PERTAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN
PERIKANAN)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tugas akhir yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari tugas akhir ini merupakan hasil plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Saya yang menyatakan



LIZA

ABSTRAK

ANALISIS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DALAM REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KOTA MEDAN Pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan

Liza

Program Studi Akuntansi

Akultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

ulfaliza675@gmail.com

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian intern pemerintah dalam realisasi anggaran pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi sudah membantu pengelolaan keuangan, namun belum optimal karena kendala sistem SIPD. Sementara itu, sistem pengendalian intern khususnya SOP belum berjalan maksimal, terutama pada aspek pemantauan yang menyebabkan keterlambatan dan ketidakefisienan. Dengan demikian, kedua sistem tersebut berperan penting dalam realisasi anggaran, namun masih perlu ditingkatkan agar lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

Kata Kunci: Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Intern, Realisasi Anggaran

ABSTRACT

ANALYSIS OF ACCOUNTING INFORMATION SYSTEMS AND GOVERNMENT INTERNAL CONTROL SYSTEMS IN REGIONAL GOVERNMENT BUDGET REALIZATION IN MEDAN CITY

At the Department of Food Security, Agriculture, and Fisheries

Liza

Accounting Study Program

Faculty of Economics and Business

University of Muhammadiyah Sumatera Utara

ulfaliza675@gmail.com

This study aims to analyze the role of accounting information systems and government internal control systems in budget realization at the Department of Food Security, Agriculture, and Fisheries of Medan City. The method used is descriptive qualitative through interviews and documentation. The results show that the accounting information system supports financial management but is not yet optimal due to SIPD constraints. Meanwhile, the internal control system, especially SOP implementation, has not been fully effective, particularly in monitoring, causing delays and inefficiencies. Therefore, both systems play an important role but still need improvement to achieve effective, transparent, and accountable budget realization.

Keywords: Accounting Information System, Internal Control System, Budget Realization

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum wr.wb

Alhamdulillah segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan anugerah-nya dan segala kenikmatan yang luar biasa banyaknya, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal tugas akhir yang berjudul “Analisis Sistem Akuntansi dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kota Medan ” yang ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan stata satu (S1) Akuntansi, pada program studi Ekonomi dan Bisnis – Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman gelap ke zaman yang terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulis menyadari, bahwa sesungguhnya penulisan dan penyusunan proposal tugas akhir ini tidak terlepas dari bimbingan dan nasehat serta pengarahan dari berbagai pihak, untuk itu dengan segala kerendahan hati, tulus dan ikhlas penulis mengucapkan terima kasih kepada Ayahanda **Asahan** dan Ibunda **Masnah** yang telah memberikan dukungan baik moril maupun material serta do'a restu sangat bermanfaat sehingga Penulis dapat menyelesaikan proposal tugas akhir ini serta yang telah membantu dan memberi dorongan kepada penuli sehingga proposal tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik. Dan pad kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Agussani, M.AP** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah

Sumatera Utara.

2. Bapak **Dr. Radiman, S.E., M.Si.** selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak **Dr. Hasrudy Tanjung, S.E., M.Si** selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak **M. Shareza Hafiz, S.E., M.Acc** selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu **Nabilla Dwi Agintha, S.E., M.Sc** selaku Ketua Program Studi Akuntansi.
6. Bapak **M. Firza Alpi, S.E., M.Si** selaku Sekretaris Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak **Khairul Anwar Pulungan, SE., M.Si** sebagai Dosen Pembimbing proposal tugas akhir ini atas keluagan waktunya dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun proposa tugas akhir ini.
8. Bapak dan Ibu dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yang telah banyak berjasa memberikan ilmu dan mendidik penulis selama masa perkuliahan.
9. Terimakasih kepada seluruh pegawai dan staff di Dinas ketahanan pangan, pertanian dan perikanan kota medan yang telah memberikan izin mengambil data kepada penulis untuk menyelesaikan proposal tugas akhir ini.
10. *Last but not least*, Terimakasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha dan berjuang sejauh ini, Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan untuk menyerah sesulit apapun prosesnya. Ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri. *I wanna thank me for just being me at all times.*

Akhir kata, penulis mengucapkan banyak terima kasih, proposal tugas akhir ini tidak luput dari berbagai kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikan sehingga akhirnya proposal tugas akhir ini dapat memberikan manfaat yang banyak bagi semua pihak.

Medan, April 2026

Liza
NPM. 2105170149

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| ABSTRAK..... | i |
| ABSTRACT | ii |
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI..... | vi |
| DAFTAR TABEL..... | ix |
| DAFTAR GAMBAR | x |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Identifikasi Masalah | 15 |
| 1.3. Rumusan Masalah | 15 |
| 1.4. Tujuan Penelitian..... | 15 |
| 1.5. Manfaat Penelitian..... | 16 |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA | 17 |
| 2.1. Landasan Teori | 17 |
| 2.1.1. Realisasi Anggaran..... | 17 |
| 2.1.1.1. Pengertian Realisasi Anggaran | 17 |
| 2.1.1.2. Unsur-Unsur dalam Laporan Realisasi Anggaran | 20 |
| 2.1.1.3. Manfaat Laporan Realisasi Anggaran | 21 |
| 2.1.1.4 Indikator Realisasi Anggaran | 23 |
| 2.1.2. Sistem Informasi | 24 |
| 2.1.2.1. Pengertian Sistem Informasi | 24 |
| 2.1.2.2. Fungsi dan Tujuan Sistem Informasi | 25 |
| 2.1.3 Sistem Informasi Akuntansi | 25 |
| 2.1.3.1 Pengertian Sistem Informasi Akuntansi | 25 |

| | |
|--|-----------|
| 2.1.3.2 Manfaat dan Tujuan Sistem Informasi Akuntansi | 27 |
| 2.1.3.3 Komponen Komponen Sistem Informasi Akuntansi | 29 |
| 2.1.3.4 Indikator Sistem Informasi Akuntansi | 30 |
| 2.1.4 Sistem Pengendalian Intern..... | 32 |
| 2.1.4.1. Pengertian Sistem Pengendalian Intern | 32 |
| 2.1.4.2. Faktor Sistem Pengendalian Intern | 35 |
| 2.1.4.3. Indikator Sistem Pengendalian Intern | 37 |
| 2.2. Penelitian Terdahulu | 40 |
| 2.3. Kerangka Konseptual | 36 |
| BAB III METODE PENELITIAN..... | 44 |
| 3.1. Jenis Penelitian | 44 |
| 3.2. Defenisi Operasional | 44 |
| 3.3. Tempat dan Waktu Penelitian | 46 |
| 3.4. Jenis dan Sumber Data | 47 |
| 3.5. Teknik Pengumpulan data..... | 47 |
| 3.6. Teknik Analisis Data | 48 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN | 50 |
| 4.1. Hasil Penelitian..... | 50 |
| 4.1.1. Gambaran Umum Objek Penelitian | 50 |
| 4.1.2. Data Realisasi Anggaran | 51 |
| 4.1.3. Hasil Wawamcara | 52 |
| 4.2. Analisis Data | 52 |
| 4.2.1. Realisasi Anggaran..... | 52 |
| 4.2.2. Sistem Infromasi Akuntansi | 54 |
| 4.2.3. Sistem Pengendalian Intern..... | 55 |
| 4.3. Pembahasan | 56 |

| | |
|---|-----------|
| 4.3.1. Bagaimana Peran Sistem Informasi Akuntansi Pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan | 56 |
| 4.3.2. Sistem Pengendalian Intern Khusus SOP Pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kota Medan | 59 |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN | 61 |
| 5.1. Kesimpulan | 61 |
| 5.2. Saran | 62 |
| DAFTAR PUSTAKA | 64 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 1.1 Realisasi Anggaran..... | 2 |
| Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu..... | 34 |
| Tabel 3.1 Waktu Penelitian | 39 |
| Tabel 4.1. Dtaa Realisasi Anggaran | 51 |
| Tabel 4.2 Hasil Wawancara dan Observasi..... | 52 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 1.1 Flowchart SOP Pengajuan Gaji..... | 11 |
| Gambar 2.1 Kerangka Konsep..... | 36 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era reformasi ini, terciptanya pemerintahan yang baik menjadi syarat penting bagi setiap pemerintahan dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita berbangsa dan bernegara. Tidak hanya terbatas pada pemerintah pusat, pemerintah daerah juga dituntut untuk menunjukkan kinerja yang optimal. Untuk mencapai kinerja yang baik tersebut, pemerintah daerah perlu terus melakukan perbaikan terhadap penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan yang disusun dengan baik dan berkualitas akan memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingan, khususnya dalam menciptakan transparansi kepada masyarakat (Arafani & Usman Sastradipraja, 2025).

Menurut Wijayanti dalam (Arafani & Usman Sastradipraja, 2025) Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan perusahaan dapat dicapai melalui penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan yang tepat waktu serta sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Tingkat kualitas informasi yang terdapat dalam laporan keuangan perusahaan sangat bergantung pada sejauh mana perusahaan mematuhi standar akuntansi. Laporan keuangan yang berkualitas mencerminkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya.

Anggaran belanja memiliki peran yang sangat krusial dalam menjaga keberlangsungan suatu negara. Selain berfungsi sebagai sumber pembiayaan untuk berbagai kegiatan pemerintah, anggaran belanja juga menjadi instrumen kebijakan fiskal. Pengeluaran pemerintah dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan

ekonomi secara keseluruhan, terutama ketika kondisi ekonomi sedang melemah dan sektor swasta tidak dapat beroperasi secara optimal.(Ratag et al., 2019)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) memiliki peran yang sangat vital dalam sebuah perusahaan atau instansi, karena berfungsi untuk memberikan gambaran mengenai kondisi keuangan entitas tersebut. LRA merupakan output dari proses akuntansi, yaitu kegiatan menghimpun dan mengelola data keuangan yang kemudian disajikan dalam bentuk laporan atau ringkasan lain yang dapat dimanfaatkan oleh para pengguna laporan dalam proses pengambilan keputusan.

Anggaran dalam pemerintahan berfungsi sebagai fondasi utama dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Anggaran memainkan peran strategis sebagai instrumen stabilisasi, distribusi, alokasi sumber daya publik, serta sebagai alat perencanaan, pengendalian organisasi, dan evaluasi kinerja. Oleh karena itu, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menjadi salah satu bentuk pertanggungjawaban keuangan daerah yang paling penting. Melalui LRA, para pembaca laporan dapat melakukan analisis terhadap kinerja keuangan, termasuk analisis pendapatan, belanja, dan pembiayaan.(Dien et al., 2015).

| Tahun | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Selisih (Rp) | Persentase |
|--------------|----------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|
| 2022 | 40.339.236.896 | 37.539.990.220 | 2.799.246.676 | 93,06 % |
| 2023 | 824.128.969 | 42.245.818.200 | (41.421.689.231) | 51,26 % |
| 2024 | 37.571.153.480 | 36.491.566.040 | 1.079.587.440 | 97,13 % |

Tabel 1.1 Realisasi Anggaran

Berdasarkan data pada Tabel 1.1 mengenai anggaran dan realisasi belanja pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan periode 2022–

2024, dapat diketahui adanya perbedaan antara anggaran yang telah direncanakan dengan realisasi yang terjadi setiap tahunnya. Adanya perubahan atau fluktuasi setiap tahunnya baik pada jumlah anggaran maupun realisasi. Pada tahun 2022, jumlah anggaran yang ditetapkan sebesar Rp40.339.236.896 dengan realisasi sebesar Rp37.539.990.220. Persentase realisasi pada tahun ini mencapai 93,06%, sehingga menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran telah terealisasi dengan baik walaupun masih terdapat selisih sebesar Rp2.799.246.676. Pada tahun 2023, jumlah anggaran yang tercatat sebesar Rp824.128.969, yang berarti mengalami penurunan yang sangat signifikan dibandingkan tahun 2022. Namun realisasi anggaran justru mencapai Rp42.245.818.200, sehingga mengalami kenaikan yang sangat besar dibandingkan realisasi tahun 2022. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara anggaran dan realisasi sehingga menimbulkan selisih sebesar Rp41.421.689.231. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh adanya perubahan anggaran, tambahan dana, atau penyesuaian dalam pelaksanaan kegiatan pada instansi tersebut. Pada tahun 2024, jumlah anggaran kembali meningkat menjadi Rp37.571.153.480, sehingga menunjukkan adanya kenaikan anggaran dibandingkan tahun 2023. Realisasi anggaran pada tahun ini sebesar Rp36.491.566.040, dengan persentase realisasi mencapai 97,13%.

Berdasarkan teori mengenai realisasi anggaran, pelaksanaan anggaran dapat diukur dengan membandingkan antara jumlah anggaran yang telah ditetapkan dengan realisasi anggaran yang terjadi dalam suatu periode tertentu. Perbandingan tersebut dapat menunjukkan tingkat efektivitas penggunaan anggaran dalam suatu instansi pemerintah.

Dalam penelitian ini, penerapan realisasi anggaran pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Pemerintah Daerah Kota Medan dapat dilihat dari perbandingan antara anggaran dan realisasi anggaran selama periode 2022–2024.

Pada tahun 2022, jumlah anggaran yang ditetapkan sebesar Rp40.339.236.896, sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp37.539.990.220. Berdasarkan perhitungan persentase, realisasi anggaran mencapai 93,06% dari total anggaran yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran telah digunakan dalam pelaksanaan kegiatan instansi, sehingga dapat dikatakan bahwa realisasi anggaran pada tahun tersebut tergolong efektif.

Pada tahun 2023, jumlah anggaran yang tercatat sebesar Rp824.128.969, sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp42.245.818.200. Persentase realisasi anggaran pada tahun ini mencapai 51,26%, yang menunjukkan bahwa realisasi jauh lebih besar dibandingkan anggaran yang telah direncanakan. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara anggaran dan realisasi yang kemungkinan disebabkan oleh perubahan anggaran, tambahan dana, atau penyesuaian kegiatan dalam pelaksanaan program instansi.

Pada tahun 2024, jumlah anggaran yang ditetapkan sebesar Rp37.571.153.480, sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp36.491.566.040. Persentase realisasi anggaran mencapai 97,13%, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran hampir sepenuhnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Berdasarkan perbandingan tersebut, dapat diketahui bahwa realisasi anggaran pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Pemerintah

Daerah Kota Medan menunjukkan tingkat pencapaian yang cukup baik, terutama pada tahun 2022 dan 2024 yang memiliki persentase realisasi mendekati 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran pada instansi tersebut telah berjalan dengan cukup efektif.

Selain itu, pelaksanaan realisasi anggaran tersebut tidak terlepas dari peran sistem informasi akuntansi yang digunakan untuk mencatat dan mengelola transaksi keuangan serta sistem pengendalian intern pemerintah yang berfungsi mengawasi penggunaan anggaran agar sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Dengan adanya sistem informasi akuntansi dan pengendalian intern yang baik, maka proses realisasi anggaran dapat berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara umum pengelolaan anggaran pada instansi tersebut cukup baik, namun masih perlu adanya pengendalian dan perencanaan anggaran yang lebih optimal agar perbedaan antara anggaran dan realisasi tidak terlalu besar sehingga penggunaan anggaran dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006, Laporan Realisasi Anggaran merupakan laporan yang menunjukkan pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang terealisasi dalam suatu periode tertentu. Tingkat efektivitas dan efisiensi dari realisasi anggaran tersebut perlu dievaluasi untuk mengetahui sejauh mana anggaran telah diserap oleh suatu dinas atau pemerintah daerah. (Prasetyo & Nugraheni, 2020)

Menurut Mahsun dalam (Dona & Lestari, 2020) Laporan realisasi anggaran merupakan dokumen yang menyajikan informasi mengenai pendapatan dan belanja yang telah direalisasikan oleh suatu entitas, serta perbandingannya dengan anggaran yang telah ditetapkan. Melalui laporan ini, dapat diperkirakan jumlah sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, serta mengidentifikasi potensi ketidakpastian atas penerimaan tersebut. Selain itu, laporan ini juga memberikan gambaran mengenai apakah pemanfaatan sumber daya ekonomi telah dilakukan secara efisien, efektif, dan ekonomis, sesuai dengan rencana anggaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Mardiasmo (2017) Realisasi merupakan proses untuk mengubah sebuah rencana menjadi tindakan nyata. Berdasarkan beberapa penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa laporan realisasi adalah laporan yang menggambarkan secara aktual pendapatan dan beban berdasarkan rencana anggaran yang telah disusun oleh suatu entitas. Menurut pendapat (Nugroho, 2013; Heriyanto, 2012; Miliasih, 2012; Suhipna dan Winarti, 2013) secara umum, realisasi anggaran dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti perencanaan anggaran, kebijakan atau peraturan pemerintah, kualitas sumber daya manusia, aspek teknis, koordinasi antar pihak, serta proses pengadaan barang dan jasa. Faktor-faktor tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, yaitu faktor administratif, organisasi, psikologis, dan budaya dalam pengelolaan anggaran. (Anna M & dwi, 2011)

Menurut Mulyadi (2001:3) Sistem informasi akuntansi adalah kumpulan formulir, pencatatan, dan pelaporan yang disusun secara sistematis untuk

menyajikan informasi keuangan yang dibutuhkan manajemen, dengan tujuan mendukung kelancaran pengelolaan perusahaan. Sistem ini dirancang khusus untuk mengolah data akuntansi menjadi informasi yang bermanfaat (Lestari, 2023). Menurut Mulyadi, (2008:3) Sistem informasi akuntansi merupakan jenis sistem informasi yang bertujuan untuk menyediakan data yang dibutuhkan oleh pihak pengelola usaha, meningkatkan kualitas informasi yang dihasilkan oleh sistem sebelumnya, memperkuat pengendalian akuntansi dan pemeriksaan internal, serta membantu mengurangi biaya administratif dalam pengelolaan catatan akuntansi. (Paramitha & Mulyadi, 2017)

Menurut Suwartika dalam (Hardiyanti et al., 2022) Sistem informasi akuntansi merupakan komponen yang sangat krusial dalam pengolahan informasi, karena mampu menerima data keuangan mentah dan mengubahnya menjadi informasi yang berguna, baik untuk kebutuhan internal maupun eksternal organisasi.

Menurut Reo, Soleiman, and Hopong dalam (Hardiyanti et al., 2022) Sistem informasi akuntansi memiliki peran yang signifikan terhadap kinerja karyawan, karena menyajikan laporan keuangan yang relevan dan andal, yang dapat dijadikan sebagai sumber informasi serta dasar dalam proses pengambilan keputusan.

Sistem informasi akuntansi merupakan elemen utama dalam sistem akuntansi manajemen. Secara fundamental, sistem ini merupakan gabungan yang terintegrasi dari berbagai sistem pemrosesan transaksi yang dijalankan dalam suatu perusahaan (Mulyanti, 2021).

Salah satu sistem informasi yang umum digunakan dalam perusahaan adalah sistem informasi akuntansi. Sistem ini merupakan sistem berbasis komputer yang

berfungsi untuk menyajikan informasi keuangan serta data yang diperoleh dari proses pengumpulan dan pengolahan transaksi, dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengambilan keputusan, sehingga perusahaan dapat meraih keunggulan kompetitif. Sistem informasi akuntansi memiliki peranan penting dalam membantu perusahaan melakukan perencanaan, pengendalian, analisis, pengambilan keputusan, dan penyusunan laporan keuangan secara efektif. Oleh karena itu, sistem ini sangat bermanfaat dalam meningkatkan efektivitas kinerja keuangan dan manajerial, yang pada akhirnya mencerminkan kinerja perusahaan secara keseluruhan (Saputri et al., 2023).

Menurut Rai (2008:283) sistem pengendalian intern merupakan serangkaian kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang cukup kepada manajemen bahwa organisasi dapat mencapai tujuan dan sasarnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008, sistem ini merupakan proses yang melekat dalam setiap tindakan dan aktivitas, yang dilakukan secara berkelanjutan oleh pimpinan serta seluruh pegawai. Tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian tujuan organisasi melalui pelaksanaan kegiatan yang efisien dan efektif, keandalan laporan keuangan, perlindungan terhadap aset negara, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sistem pengendalian intern merupakan suatu proses yang dirancang untuk memberikan tingkat keyakinan yang memadai terhadap tercapainya tujuan Pemerintah Daerah, yang tercermin melalui keandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program serta kegiatan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. (PP 58 Tahun 2005) (Angel Siti Fatimah & Aini

Rahmah, 2022).

Pengendalian intern memainkan peran penting dalam upaya pencegahan kecurangan. Pengendalian ini merupakan bagian dari sistem yang berfungsi sebagai pedoman dan prosedur operasional bagi suatu perusahaan atau organisasi. Umumnya, perusahaan menerapkan Sistem Pengendalian Intern untuk mengelola jalannya operasional serta mencegah terjadinya penyalahgunaan atau tindakan curang. Salah satu tujuan utama dari pengendalian intern atas persediaan adalah untuk menjamin keamanan barang persediaan serta memastikan bahwa data persediaan disajikan secara tepat dan akurat dalam laporan keuangan (Putri et al., 2023).

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah sistem yang diterapkan di seluruh instansi pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, SPIP terdiri dari lima unsur utama, yaitu: (1) lingkungan pengendalian, (2) penilaian risiko, (3) kegiatan pengendalian, (4) informasi dan komunikasi, serta (5) pemantauan atas pengendalian intern (Bengkulu et al., 2019).

Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 pemantauan merupakan salah satu unsur dalam SPIP yang bertujuan untuk memastikan seluruh komponen pengendalian internal berjalan efektif dan efisien, termasuk dalam pengelolaan keuangan, proses pencairan anggaran, serta pembayaran gaji pegawai.

Pemantauan atas pengendalian intern merupakan proses evaluasi yang bersifat rasional dan terus berlangsung terhadap informasi yang disampaikan dalam komunikasi, yang bertujuan untuk mendukung pengendalian manajerial. Kegiatan inti dalam pengawasan mencakup supervisi yang efisien, akuntabilitas melalui

pencatatan, serta audit internal.(Yuniarti, Dessy Windia; Sulistiyati, Titik Dwi; Suprayitno, 2013).

Pemantauan terhadap sistem pengendalian internal dilakukan untuk mengetahui titik-titik kelemahan yang ada serta menentukan tindakan yang diperlukan guna meningkatkan efektivitas pengendalian tersebut.(Lusiana & Arfamaini, 2022).

Pengawasan merupakan proses berkelanjutan yang bertujuan untuk menilai kualitas pengendalian internal secara periodik dan melakukan tindakan perbaikan bila diperlukan. Pengawasan ini dapat dilakukan melalui aktivitas yang berlangsung secara terus-menerus, evaluasi secara terpisah, atau gabungan dari keduanya. Aktivitas yang berkesinambungan meliputi pengawasan oleh manajemen serta langkah-langkah lainnya yang dirancang untuk memastikan bahwa sistem pengendalian internal tetap berjalan secara efektif.(Lusiana & Arfamaini, 2022).

Sementara itu, menurut Permendagri No. 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Review Atas Laporan Keuangan Daerah Pasal 1 ayat (10), sistem pengendalian intern didefinisikan sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen, yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai atas terciptanya efektivitas, efisiensi, kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku, serta keandalan pelaporan keuangan daerah. Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian intern adalah suatu proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang cukup dalam mencapai tiga tujuan utama, yaitu: keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasional, serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku (Pujiono et al., 2016).

Pengendalian intern diterapkan untuk memastikan tercapainya tujuan serta mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak sesuai dengan rencana. Selain itu, pengendalian intern juga berperan dalam meningkatkan efisiensi, mencegah kerugian terhadap aset, meningkatkan keandalan data dalam laporan keuangan, serta mendorong kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, pada dasarnya pengendalian intern merupakan suatu langkah yang bersifat proaktif, karena bertujuan untuk menemukan dan melakukan perbaikan jika terdapat penyimpangan dari ketentuan yang telah ditetapkan (Pujiono et al., 2016).

Perusahaan yang dipilih dalam penelitian ini adalah Kantor Dinas ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan yang beralamat di Jl. Budi Pembangunan II No. 14, Pulo Brayon Kota, Kec. Medan Bar., Kota Medan, Sumatera Utara 20238.

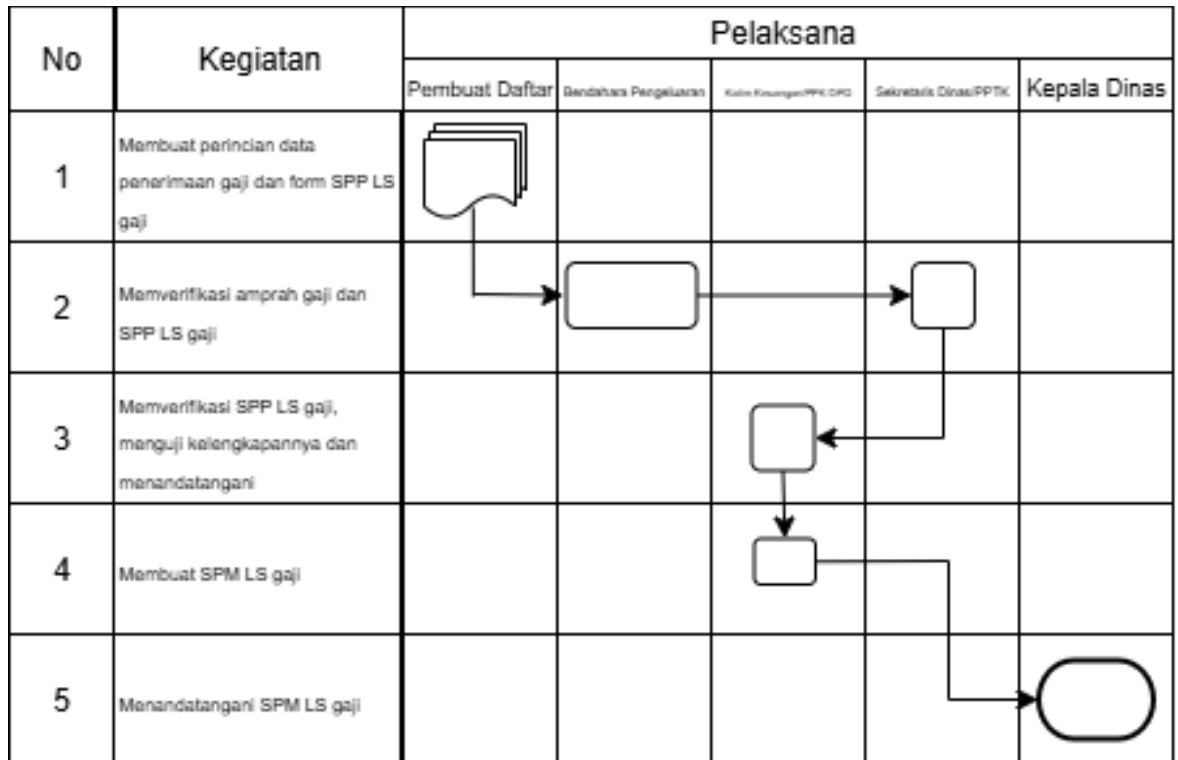
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk mengelola data dan informasi keuangannya. SIPD adalah pelakfom terintergrasi yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk pemerintahan daerah diseluruh indonesia.

SIPD membantu meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, serta intergrasi data perencanaan dan penganggaran. Namun, beberapa masalah sering terjadi seperti masalah teknis, termasuk kesulitan dalam mengakses aplikasi SIPD, server yang sering mengalami kesalahan, dan jaringan server yang terkadang macet atau memerlukan waktu lama untuk memuat.

Semua kendala ini menunjukkan bahwa pengimplementasian SIPD masih belum optimal.

Sistem Pengendalian Intern (SPI) merupakan mekanisme penting yang seharusnya diterapkan dalam setiap instansi pemerintah untuk memastikan tercapainya tujuan organisasi secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), setiap instansi wajib memiliki sistem pengendalian yang mencakup lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Tanpa adanya SPI, organisasi pemerintah menjadi rentan terhadap terjadinya kesalahan, penyimpangan, maupun inefisiensi dalam penggunaan anggaran.

Sistem Pengendalian Intern (SPI) memiliki kaitan yang erat dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), karena SPI berfungsi sebagai kerangka utama pengendalian dalam suatu organisasi, sedangkan SOP merupakan pedoman teknis yang menjabarkan langkah-langkah operasional agar pengendalian tersebut berjalan efektif. Dengan adanya SOP, setiap aktivitas yang diatur dalam SPI dapat dijalankan secara seragam, konsisten, dan sesuai aturan, sehingga mampu meminimalkan kesalahan, penyimpangan, maupun potensi kecurangan. Sebaliknya, SPI memastikan pelaksanaan SOP diawasi dan evaluasi melalui mekanisme monitoring dan audit internal. Dengan demikian, SPI dan SOP saling melengkapi, di mana SPI memberikan arah dan tujuan pengendalian, sedangkan SOP memberikan detail pelaksanaan teknis di lapangan.



Gambar 1.1 Flowchart SOP Pengajuan Gaji

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan karyawan, fenomena yang terjadi pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan meskipun telah tersedia Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman kerja teknis, namun penerapan SPI belum dijalankan secara menyeluruh. Ketiadaan SPI ini menyebabkan SOP yang ada tidak berjalan secara efektif, karena tidak ada sistem pengendalian, pemantauan, maupun evaluasi yang memastikan SOP benar-benar dipatuhi. SPI bertugas mengawasi dan memastikan SOP perusahaan dijalankan dengan benar untuk menjamin operasional berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan dan tujuan perusahaan tercapai. Khususnya pada SOP pengajuan gaji. Setiap awal tahun, pembayaran gaji pegawai PNS sering telat dibayarkan selama beberapa hari. Namun pembayaran gaji pegawai biasa sering telat dibayarkan hingga 1 atau 2 bulan. Kondisi ini menimbulkan ketidaknyamanan di

kalangan pegawai dan menunjukkan adanya kemungkinan kelamahan dalam proses pemantauan atas pengendalian internal di lingkungan dinas. Keterlambatan tersebut diduga disebabkan oleh keterlambatan verifikasi dokumen SPP LS gaji, kurangnya ketelitian dalam menguji kelengkapannya dan keterlambatan penandatanganan.

Proses tersebut membutuhkan waktu 60 menit. Namun, dalam praktiknya, Kepala Keuangan atau PPK bisa saja sibuk atau tidak berada di tempat, sehingga menyebabkan keterlambatan. Dokumen tidak Lengkap atau Tidak Sesuai, jika dokumen SPP LS Gaji yang diterima tidak lengkap atau ada kesalahan pengisian, maka verifikasi tidak bisa dilanjutkan. Ini menyebabkan proses harus dikembalikan ke tahap sebelumnya, menambah waktu. Kurangnya Pemahaman atau Ketelitian, jika PPK kurang tekun dalam memverifikasi, bisa saja terjadi kesalahan dalam pembayaran gaji seperti salah jumlah atau salah akun anggaran. Tidak Ada Standar Checklist yang Jelas, jika tidak tersedia format atau checklist standar untuk memverifikasi dokumen, PPK bisa melewatkan item penting. Dokumen Fisik yang Sulit Dilacak Bila dokumen masih dalam bentuk fisik (bukan digital), potensi hilang, rusak, atau tercecer bisa menjadi kendala besar. Kurangnya SDM atau Overload Pekerjaan, jika PPK menangani terlalu banyak dokumen atau pekerjaan lain, maka proses ini bisa tertunda. Sistem Informasi Tidak Mendukung (Jika Online), jika menggunakan aplikasi atau SIPD, gangguan sistem atau akses lambat bisa menyebabkan verifikasi terhambat. Fenomena ini mengindikasikan bahwa fungsi pemantauan sebagai unsur utama dalam sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) belum berjalan maksimal. Apabila proses pemantauan tidak dilakukan secara rutin dan menyeluruh, maka potensi terjadinya kesalahan

administrasi, keterlambatan proses keuangan, maupun penyimpangan prosedur akan semakin besar.

Berdasarkan fenomena diatas, maka penulis mengambil judul “**Analisis Sistem Informasi Akuntansi Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dalam Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kota Medan Pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas dapat diidentifikasi masalah yang dihadapi oleh kantor Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan sebagai berikut:

1. Sering terjadi masalah teknis yang menunjukkan bahwa implementasian SIPD masih belum optimal.
2. Kurang optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern yang menyebabkan Standar Operasional Prosedur (SOP) tidak berjalan secara efektif.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang maka yang telah dijelaskan penulis dapat merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana peran sistem informasi akuntansi pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan?
2. Bagaimana sistem pengendalian intern khususnya SOP pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis peran sistem informasi akuntansi pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan.
2. Untuk menganalisis peran sistem pengendalian intern pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas tentang sistem informasi akuntansi secara lebih mendalam. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan wawasan tambahan mengenai realisasi anggaran pada Kantor Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan.
 - b. Bagi peneliti di masa mendatang, penelitian ini dapat memberikan referensi dan bahan pustaka yang berguna untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian intern terhadap realisasi anggaran pemerintah daerah.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan bagian dari proses pembelajaran yang diharapkan dapat memperluas wawasan pengetahuan, sehingga dapat lebih memahami teori-teori yang telah di pelajari dalam konteks nyata di lapangan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Realisasi Anggaran

2.1.1.1 Pengertian Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan bagian dari laporan keuangan pemerintah yang menyajikan informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, serta pembiayaan yang telah direalisasikan oleh suatu entitas pelaporan. Informasi ini disajikan secara berdampingan dengan data anggaran yang telah ditetapkan, untuk periode tertentu. Dengan kata lain, LRA memberikan gambaran perbandingan antara anggaran yang direncanakan dan realisasi yang dicapai selama periode pelaporan.

Anggaran merupakan rencana kegiatan organisasi yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka atau satuan moneter untuk periode tertentu. Menurut Abdul Halim, anggaran merupakan rencana kerja organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dalam satuan uang yang disusun untuk periode tertentu dan digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan organisasi. Sedangkan menurut Mardiasmo, anggaran sektor publik merupakan rencana kegiatan organisasi yang dinyatakan dalam bentuk angka untuk periode tertentu yang berfungsi sebagai alat perencanaan dan pengendalian dalam pengelolaan keuangan organisasi. Berdasarkan teori tersebut dapat disimpulkan bahwa anggaran merupakan rencana keuangan yang disusun oleh organisasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan serta sebagai alat untuk mengendalikan penggunaan sumber daya yang dimiliki.

Realisasi anggaran merupakan pelaksanaan dari anggaran yang telah direncanakan sebelumnya. Realisasi anggaran menunjukkan sejauh mana anggaran yang telah ditetapkan dapat digunakan dalam pelaksanaan kegiatan organisasi. Menurut Mahsun Mohamad, realisasi anggaran merupakan bentuk implementasi dari rencana keuangan organisasi yang menunjukkan tingkat penggunaan anggaran dalam suatu periode tertentu. Sedangkan menurut Deddi Nordiawan, realisasi anggaran merupakan hasil pelaksanaan dari anggaran yang telah disusun sebelumnya yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan suatu instansi pemerintah. Dengan demikian realisasi anggaran dapat digunakan sebagai indikator untuk mengetahui apakah pelaksanaan kegiatan organisasi telah berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang disusun dalam laporan keuangan akan dijabarkan secara mendetail dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Penjabaran ini mencakup informasi yang memengaruhi pelaksanaan anggaran, seperti kebijakan fiskal dan moneter, alasan terjadinya perbedaan signifikan antara anggaran dan realisasinya, serta rincian tambahan terhadap angka-angka yang memerlukan penjelasan lebih lanjut. Melalui LRA, dapat diperkirakan potensi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk membiayai kegiatan pemerintah pusat maupun daerah, serta risiko ketidakpastian yang mungkin menyertainya. Selain itu, laporan ini juga menyampaikan gambaran mengenai apakah perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi telah dilakukan sesuai dengan prinsip ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, serta apakah pelaksanaannya telah sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berikut ini merupakan pengertian Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menurut beberapa ahli:

- 1) Menurut Dedi Nordiawan menyatakan bahwa LRA adalah laporan yang menampilkan ringkasan mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, dalam satu periode pelaporan.
- 2) Menurut Rudianto mengartikan LRA sebagai suatu rencana kegiatan yang mencakup estimasi belanja yang diusulkan untuk satu periode tertentu beserta sumber pendapatan yang direncanakan guna membiayai belanja tersebut.
- 3) Menurut Indra Bastian menjelaskan bahwa LRA merupakan laporan yang menunjukkan perbedaan antara jumlah anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD pada awal periode dengan realisasi yang dicapai hingga akhir periode.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa Laporan Realisasi Anggaran adalah rangkaian aktivitas pelaporan yang menyajikan informasi terkait ringkasan sumber daya ekonomi, alokasi, serta penggunaannya, dan menggambarkan perbandingan antara anggaran yang direncanakan dengan realisasi yang dicapai dalam satu periode pelaporan, yang mencakup unsur pendapatan dan belanja. Dalam pengelolaan keuangan sektor publik, realisasi anggaran juga berkaitan erat dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. Realisasi anggaran menjadi indikator penting untuk menilai kinerja keuangan pemerintah karena melalui realisasi anggaran dapat

diketahui tingkat efektivitas pelaksanaan program serta kemampuan pemerintah dalam mengelola sumber daya yang tersedia (Bastian, 2014).

2.1.1.2 Unsur-Unsur dalam Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan laporan yang memuat ringkasan mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan dana kas yang dikelola oleh pemerintah daerah dalam suatu periode tertentu, yang umumnya berlangsung selama satu tahun (Prasetyo & Nugraheni, 2020). Berikut penjelasan dari masing-masing unsur tersebut:

1. Pendapatan LRA

Merupakan penerimaan yang diperoleh oleh Bendahara Umum Negara atau Daerah, serta dapat berasal dari entitas pemerintah lainnya. Pendapatan ini menambah saldo anggaran lebih dalam periode anggaran tertentu dan merupakan hak pemerintah, sehingga tidak perlu dikembalikan.

2. Belanja

Menggambarkan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh Bendahara Umum Negara atau Daerah. Aktivitas belanja ini pada umumnya mengurangi jumlah saldo anggaran lebih selama periode anggaran berjalan.

3. Transfer

Merujuk pada arus masuk dan keluar dana antara satu entitas dengan entitas pemerintah lainnya. Di dalamnya termasuk dana perimbangan, dana bagi hasil, serta transfer lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan program atau proyek tertentu.

4. Pembiayaan

Merujuk pada setiap transaksi penerimaan maupun pengeluaran yang tidak berdampak langsung terhadap perubahan kekayaan suatu entitas. Semua transaksi pembiayaan bersifat wajib untuk dikembalikan atau diterima kembali dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Dalam konteks anggaran pemerintah, pembiayaan berfungsi untuk menutup kekurangan anggaran (defisit). Sumber pembiayaan dapat berasal dari, misalnya, pinjaman atau hasil penjualan aset (divestasi), sementara pengeluaran pembiayaan mencakup pembayaran kembali utang, pemberian pinjaman kepada pihak lain, serta penyertaan modal pemerintah. Secara keseluruhan, laporan realisasi anggaran menyajikan perbandingan antara nilai anggaran yang direncanakan dengan realisasi aktual selama periode pelaporan tertentu.

2.1.1.3 Manfaat Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran memberikan beragam informasi penting yang berkaitan dengan pendapatan, belanja, transfer, surplus atau defisit, serta pembiayaan suatu entitas. Informasi ini menjadi dasar penting dalam mengevaluasi berbagai keputusan, khususnya yang berkaitan dengan alokasi sumber daya ekonomi, akuntabilitas, serta kepatuhan entitas pelaporan terhadap anggaran yang telah ditetapkan.

Beberapa manfaat utama dari laporan ini antara lain:

1. Memberikan gambaran mengenai bagaimana sumber daya ekonomi dialokasikan, dari mana asalnya, serta bagaimana penggunaannya.

2. Dapat dijadikan alat untuk memperkirakan kemampuan pendanaan kegiatan pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah, pada periode mendatang.
3. Menyediakan data yang dapat digunakan oleh para pemangku kepentingan untuk menilai dan mengevaluasi keputusan yang akan diambil. Keputusan terkait pemanfaatan sumber daya ekonomi, akuntabilitas, dan kepatuhan dalam entitas pelaporan diambil pada tingkat yang strategis, guna memastikan bahwa proses pengelolaan keuangan dapat berjalan secara efektif dan tertib.
4. Keberadaan laporan realisasi anggaran memberikan gambaran rinci mengenai kondisi keuangan secara keseluruhan. Informasi ini menjadi sumber data yang sangat akurat untuk menilai sejauh mana pendapatan telah diperoleh serta bagaimana sumber daya ekonomi telah direalisasikan secara efektif.
5. Laporan ini juga dapat digunakan untuk menilai apakah pendapatan dan penggunaan anggaran telah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, laporan tersebut berguna sebagai dasar pengambilan keputusan terkait alokasi sumber daya ekonomi serta tanggung jawab (akuntabilitas) penggunaan anggaran di masa yang akan datang.

Secara umum, laporan realisasi anggaran menyajikan data terkait perolehan dan pemanfaatan sumber daya ekonomi yang telah dilakukan, serta menilai apakah pelaksanaannya berjalan secara efektif, efisien, hemat, dan sesuai dengan ketentuan anggaran serta regulasi yang berlaku.

2.1.1.4 Indikator Realisasi Anggaran

Mardiasmo (2018) menjelaskan bahwa realisasi anggaran adalah tahap yang menunjukkan sejauh mana anggaran yang telah disusun dapat dicapai dalam pelaksanaan. Artinya, realisasi anggaran mengukur kesesuaian penggunaan dana dengan rencana yang telah ditetapkan.

Indikator Realisasi Anggaran Menurut Mardiasmo (2018) sebagai berikut :

1. Persentase Realisasi Belanja terhadap Anggaran: menunjukkan perbandingan antara anggaran yang digunakan dengan anggaran yang dialokasikan. Semakin tinggi persentase, semakin besar anggaran yang dimanfaatkan, namun output tetap harus diperhatikan.
2. Kesesuaian antara Realisasi dan Rencana Kegiatan; realisasi anggaran harus sesuai dengan kegiatan yang telah direncanakan, seperti RKA atau DPA, untuk memastikan penggunaan dana tetap pada koridor tujuan organisasi dan menghindari pemborosan.
3. Ketepatan Waktu dalam Pelaksanaan Anggaran; pelaksanaan anggaran tepat waktu mendukung kelancaran program kerja dan pelayanan masyarakat. Keterlambatan berpotensi menurunkan kualitas hasil dan menumpuk pekerjaan akhir tahun.
4. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA); SiLPA adalah sisa anggaran yang tidak terpakai hingga akhir tahun. Jumlah besar atau berulang menandakan masalah dalam pelaksanaan anggaran, seperti hambatan penyerapan atau kegiatan yang tidak berjalan sesuai rencana. SiLPA menjadi indikator evaluasi efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah.

2.1.2 Sistem Informasi

2.1.2.1 Pengertian Sistem Informasi

Sistem informasi adalah sebuah rangkaian prosedur formal dimana data dikumpulkan, diproses menjadi informasi dan didistribusikan kepada para pemakai (Christina Kurnia Agatha, 2018).

Sistem informasi menurut Laudon (La Midjan dan Susanto, 2004) adalah komponen-komponen yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan dan menyebarkan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan, koordinasi, pengendalian dan untuk memberikan gambaran aktivitas di dalam perusahaan. Laitch dan Bavis (Kusrini dan Koniyo, 2007) sistem informasi merupakan suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan (Abdul Kadir, 2018).

Sistem Informasi di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan adalah suatu sistem berbasis teknologi informasi yang digunakan untuk mengelola, mengintegrasikan, dan menyajikan data serta informasi yang berkaitan dengan sektor pangan, pertanian, dan perikanan. Sistem ini mendukung proses pengambilan keputusan, perencanaan, pelaporan, pengawasan, serta pelayanan publik.

2.1.2.2 Fungsi dan Tujuan Sistem Informasi

Ada beberapa fungsi dan tujuan sistem informasi pada dinas ketahanan pangan, pertanian dan perikanan kota medan sebagai berikut :

1. Mengumpulkan dan mengelola data terkait produksi, distribusi, konsumsi, dan stok pangan.
2. Memonitor aktivitas pertanian dan perikanan, seperti luas tanam, hasil panen, serangan hama, musim tanam, dan hasil tangkapan ikan.
3. Mendukung perencanaan program dan kegiatan berbasis data.
4. Meningkatkan efisiensi pelayanan publik, seperti pendataan petani/nelayan, bantuan sarana produksi, dan subsidi.
5. Memfasilitasi pelaporan kinerja instansi secara cepat dan akurat.

2.1.3 Sistem informasi Akuntansi

2.1.3.1 Pengertian Sistem Informasi Akuntansi

Sistem Informasi Akuntansi (SIA) merupakan suatu mekanisme yang dirancang untuk mengolah data serta menghasilkan laporan informasi mengenai aktivitas keuangan, baik secara manual maupun berbasis komputer. Untuk dapat memenuhi kebutuhan informasi pihak internal dan eksternal secara efektif, sistem ini perlu dirancang dengan tepat agar dapat berfungsi secara maksimal (Sari et al., 2021). Sistem informasi akuntansi merupakan suatu sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, mencatat, menyimpan, serta mengolah data keuangan sehingga menghasilkan informasi yang berguna bagi pihak yang membutuhkan dalam pengambilan keputusan.

Menurut Marshall B. Romney, sistem informasi akuntansi adalah suatu sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan memproses data untuk

menghasilkan informasi bagi para pengambil keputusan. Sementara itu menurut Krismiaji, sistem informasi akuntansi merupakan suatu sistem yang memproses data dan transaksi guna menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk merencanakan, mengendalikan, dan mengoperasikan suatu bisnis atau organisasi.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi merupakan suatu sistem yang digunakan oleh organisasi untuk mengelola data keuangan sehingga menghasilkan informasi yang dapat digunakan dalam proses perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Dalam instansi pemerintah, sistem informasi akuntansi berperan penting dalam mengelola data keuangan, termasuk dalam proses pencatatan dan pelaporan realisasi anggaran.

Menurut Putri dan Endiana (2020), SIA adalah sekumpulan sumber daya seperti tenaga manusia dan perangkat teknologi, yang disusun untuk mengubah data keuangan dan informasi lainnya menjadi bentuk informasi yang dapat digunakan oleh para pengambil keputusan. Sementara itu, Widjajanto dalam Hanum (n.d.) menyebutkan bahwa SIA mencakup berbagai dokumen, catatan, peralatan (termasuk komputer dan perlengkapannya), alat komunikasi, tenaga operasional, dan laporan yang saling berkaitan serta dirancang secara sistematis untuk mengubah data keuangan menjadi informasi yang dibutuhkan manajemen.

Azzahra dan Kurnia (2024) menekankan bahwa SIA merupakan bagian yang sangat penting dalam dunia akuntansi dan bisnis, karena mampu menyajikan informasi keuangan yang akurat serta dapat dipercaya. Informasi ini sangat membantu dalam proses pengambilan keputusan bisnis di masa mendatang. Selain itu, SIA juga mengandung unsur pengendalian yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung sistem pengendalian internal organisasi.

Saragih Fitri (2023) mengartikan SIA sebagai sebuah jaringan yang terdiri dari berbagai prosedur, formulir, catatan, dan perangkat yang berfungsi untuk mengelola data keuangan menjadi laporan yang berguna bagi manajemen dalam mengontrol kegiatan usaha dan mengambil keputusan strategis. Dalam sektor publik, penerapan sistem informasi akuntansi sangat penting karena mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah melalui pencatatan dan pelaporan transaksi yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan (Romney & Steinbart, 2018).

Dari berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa Sistem Informasi Akuntansi merupakan sebuah sistem yang berfungsi untuk mengolah dan menyajikan data keuangan menjadi informasi yang bermanfaat bagi proses pengambilan keputusan oleh pihak internal maupun eksternal. Sistem ini terdiri dari berbagai komponen yang saling terintegrasi, termasuk sumber daya manusia, peralatan, dan prosedur kerja, untuk menghasilkan informasi keuangan yang akurat dan dapat diandalkan. Selain itu, SIA juga memiliki fungsi pengendalian yang penting untuk mendukung efektivitas pengawasan internal dalam organisasi. Oleh karena itu, SIA memiliki peran vital dalam mendukung aktivitas operasional bisnis dan pengambilan keputusan.

2.1.3.2 Manfaat dan Tujuan Sistem Informasi Akuntansi

Menurut Diana dan Setiawati (dalam Otinur et al., 2017), tujuan utama dari Sistem Informasi Akuntansi (SIA) antara lain adalah untuk melindungi aset atau kekayaan perusahaan seperti kas, persediaan barang dagangan, hingga aset tetap serta menyediakan berbagai jenis informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan. Selain itu, SIA juga menyajikan informasi bagi pihak eksternal,

membantu menilai kinerja individu maupun unit kerja, serta menyediakan data historis yang berguna untuk keperluan audit. SIA turut mendukung proses penyusunan dan evaluasi anggaran perusahaan, serta menyediakan informasi penting dalam aktivitas perencanaan dan pengendalian operasional.

Berdasarkan teori mengenai sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian intern, anggaran, dan realisasi anggaran, dapat diketahui bahwa pelaksanaan realisasi anggaran dalam suatu instansi pemerintah memerlukan sistem yang mampu mengelola informasi keuangan secara akurat serta mekanisme pengawasan yang baik. Sistem informasi akuntansi berperan dalam mencatat dan mengolah data keuangan yang berkaitan dengan penggunaan anggaran sehingga menghasilkan informasi yang akurat mengenai realisasi anggaran. Sementara itu, sistem pengendalian intern pemerintah berfungsi untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan serta mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan. Dalam penelitian ini, penerapan sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian intern pemerintah menjadi faktor penting dalam mendukung proses realisasi anggaran pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Pemerintah Daerah Kota Medan. Dengan adanya sistem informasi akuntansi yang baik serta pengendalian intern yang efektif, maka proses realisasi anggaran diharapkan dapat berjalan secara transparan, akuntabel, serta sesuai dengan anggaran yang telah direncanakan.

Berdasarkan penjabaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa SIA memiliki peran sentral dalam mengelola serta mengawasi aset perusahaan, sekaligus menjadi sumber informasi yang akurat bagi pengambilan keputusan strategis. Selain itu, SIA juga mendukung transparansi kepada pihak eksternal, mengevaluasi kinerja

internal, serta menjadi dasar dalam audit, perencanaan, dan penganggaran. Oleh karena itu, SIA merupakan alat manajerial yang sangat penting dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional perusahaan secara keseluruhan.

2.1.3.3 Komponen-komponen Sistem Informasi Akuntansi

Menurut Romney dan Steinbart (2015), terdapat enam elemen utama dalam Sistem Informasi Akuntansi (SIA) yang saling terhubung dan berperan penting dalam mendukung fungsi akuntansi dalam suatu organisasi, yaitu:

1. Pengguna Sistem

Komponen ini meliputi individu atau kelompok yang berinteraksi langsung dengan sistem, seperti akuntan, manajer, dan staf operasional lainnya. Mereka memiliki tanggung jawab untuk menjalankan sistem, melakukan analisis data, serta mengambil keputusan berdasarkan informasi yang diperoleh dari sistem.

2. Prosedur dan Panduan Kerja

Merupakan serangkaian langkah dan instruksi yang digunakan dalam proses pengumpulan, pengolahan, dan penyimpanan data. Prosedur ini dirancang untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan memiliki tingkat keakuratan dan konsistensi yang tinggi serta dapat dipercaya.

3. Data Organisasi dan Aktivitas Bisnis

Komponen ini mencakup informasi penting yang berkaitan dengan operasional perusahaan, seperti data keuangan, catatan transaksi, dan kegiatan bisnis lainnya. Data tersebut menjadi landasan utama dalam proses analisis dan pengambilan keputusan manajerial.

4. Perangkat Lunak

Mengacu pada program atau aplikasi komputer yang digunakan untuk memproses data yang telah dikumpulkan. Termasuk di dalamnya adalah software akuntansi, sistem manajemen basis data, dan alat analisis yang membantu dalam menyusun laporan keuangan.

5. Infrastruktur Teknologi Informasi

Bagian ini mencakup semua perlengkapan fisik yang dibutuhkan untuk menjalankan sistem, seperti komputer, printer, scanner, serta jaringan komunikasi yang menghubungkan seluruh komponen sistem. Infrastruktur ini sangat vital dalam memastikan sistem dapat berjalan secara efisien dan akses terhadap data tetap terjaga.

6. Pengendalian Internal dan Keamanan Sistem

Elemen ini terdiri dari kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk melindungi sistem serta menjaga integritas data. Kontrol internal bertujuan untuk mencegah terjadinya kesalahan dan tindakan kecurangan, sedangkan sistem keamanan menjaga data dari akses yang tidak sah atau penyalahgunaan informasi.

2.1.3.4 Indikator Sistem Informasi Akuntansi

Sistem akuntansi yang digunakan oleh suatu perusahaan belum tentu dapat diterapkan secara langsung di perusahaan lain, mengingat setiap organisasi memiliki ciri khas dan kebutuhan yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, sistem akuntansi perlu disesuaikan dengan karakteristik serta kondisi spesifik perusahaan yang bersangkutan (Chairina & Wehartaty, n.d.).

Dalam kaitannya dengan pengukuran keberhasilan sistem informasi akuntansi, William H. DeLone dan Ephraim R. McLean mengembangkan sebuah model yang

dikenal dengan DeLone & McLean Information System Success Model (D&M IS Success Model) (DeLone & McLean, 1992 dalam Jogiyanto, 2007). Model ini mencakup enam indikator utama, yaitu:

1. Kualitas Sistem (System Quality)

Indikator ini menggambarkan mutu dari kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam sistem informasi. Fokus utamanya adalah pada performa sistem, yakni seberapa baik perangkat dan prosedur yang diterapkan dapat memenuhi kebutuhan informasi pengguna.

2. Kualitas Informasi (Information Quality)

Kualitas informasi merujuk pada nilai informasi yang dihasilkan dari sistem. Aspek ini mencakup akurasi, ketepatan waktu, serta cara penyajian informasi yang dinilai langsung oleh pengguna.

3. Kualitas Layanan (Service Quality)

Merupakan tingkat pelayanan yang diberikan oleh penyedia atau pengembang sistem informasi kepada pengguna. Hal ini termasuk responsivitas terhadap masalah, pemeliharaan sistem, serta pembaruan yang diberikan secara berkala.

4. Penggunaan (Use)

Mengacu pada seberapa sering dan sejauh mana sistem informasi digunakan oleh individu dalam organisasi. Penggunaan ini bisa bersifat sukarela atau karena keharusan, dan diukur berdasarkan frekuensi serta intensitas pemanfaatan sistem.

5. Kepuasan Pengguna (User Satisfaction)

Merupakan persepsi subjektif pengguna terhadap pengalaman mereka setelah menggunakan sistem informasi. Tingkat kepuasan ini dipengaruhi oleh efisiensi, efektivitas, serta sejauh mana sistem memenuhi harapan pengguna.

6. Manfaat Bersih (Net Benefits)

Indikator ini mencerminkan dampak nyata dari penggunaan sistem informasi, baik pada level individu maupun organisasi. Manfaat tersebut dapat berupa peningkatan produktivitas, efisiensi waktu, perbaikan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan pengetahuan.

2.1.4 Sistem Pengendalian Intern

2.1.4.1 Pengertian Sistem Pengendalian Intern

Sistem Pengendalian Intern (SPI) merupakan salah satu elemen penting dalam struktur organisasi yang digunakan untuk mengawasi aktivitas entitas oleh manajemen guna memastikan terlaksananya tata kelola yang baik. SPI merupakan bagian integral dari proses manajemen Perusahaan Terbuka yang dibentuk untuk memberikan keyakinan memadai bahwa operasi dilakukan dengan efisiensi dan efektivitas (Heinrich & Probohudono, 2023). Sistem pengendalian intern pemerintah merupakan suatu proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan organisasi telah dilaksanakan secara efektif dan efisien serta sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Menurut Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, pengendalian intern merupakan suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen dan pegawai dalam suatu organisasi yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai tercapainya tujuan organisasi. Sedangkan

menurut Mardiasmo, pengendalian intern merupakan suatu sistem yang digunakan oleh organisasi untuk menjaga aset, memastikan keandalan informasi akuntansi, serta mendorong kepatuhan terhadap kebijakan manajemen. Dengan adanya sistem pengendalian intern yang baik, organisasi dapat meminimalkan kesalahan maupun penyimpangan dalam pengelolaan keuangan, termasuk dalam pelaksanaan realisasi anggaran.

Pengendalian intern merupakan suatu proses yang dirancang guna memberikan keyakinan yang cukup bahwa tujuan organisasi dapat tercapai, serta untuk menghindari terjadinya penyimpangan dan kebocoran dalam pelaporan keuangan (Tarigan dan Sari, 2021).

Pengendalian intern merupakan suatu sistem yang diterapkan untuk menjamin ketaatan terhadap peraturan serta mendukung terciptanya pengelolaan keuangan yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan di lingkungan pemerintah daerah (Rangkuti et al., 2022).

Pengendalian intern merupakan bagian yang menyatu dalam setiap tindakan dan aktivitas yang dijalankan secara berkesinambungan oleh pimpinan serta seluruh pegawai, dengan tujuan memberikan keyakinan yang cukup terhadap tercapainya sasaran organisasi. Hal ini dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan yang efisien dan efektif, penyusunan laporan keuangan yang andal, perlindungan terhadap aset negara, serta pemenuhan terhadap ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku (Alpi dan Akbar, 2024).

Menurut Mulyadi (2023), pengendalian intern mendukung pandangan bahwa sistem ini dirancang untuk memberikan keyakinan yang cukup bahwa aktivitas operasional perusahaan berlangsung secara efisien dan efektif, laporan

keuangan disusun secara andal, serta kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan perusahaan tetap terjaga. Sistem ini mencakup berbagai kebijakan dan prosedur yang diterapkan oleh manajemen guna melindungi aset perusahaan, mencegah dan mengidentifikasi potensi kecurangan, serta menjamin ketepatan dalam pencatatan akuntansi.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 pemantauan merupakan salah satu unsur dalam SPIP yang bertujuan untuk memastikan seluruh komponen pengendalian internal berjalan efektif dan efisien, termasuk dalam pengelolaan keuangan, proses pencairan anggaran, serta pembayaran gaji pegawai.

SPIP adalah proses untuk menjamin tercapainya tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan. Pemimpin/atasan menggunakan SPIP untuk memberikan arahan dan mencegah penggelapan atau kecurangan. SPIP yang lemah meningkatkan risiko kesalahan, ketidakakuratan, dan kecurangan dalam laporan keuangan. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ditingkatkan oleh SPIP yang kuat yang mampu meminimalkan penyimpangan atau kecurangan dalam pelaporan keuangan. Semakin baik SPIP, semakin tinggi kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Heinrich & Probohudono, 2023). Sistem pengendalian intern yang efektif akan membantu organisasi dalam mencegah terjadinya kesalahan maupun kecurangan serta memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional berjalan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan (Mulyadi, 2016).

Secara keseluruhan, pengendalian intern dapat disimpulkan sebagai suatu proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan bahwa tujuan organisasi dapat diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan yang efisien dan efektif, dengan

menjamin kepatuhan terhadap regulasi, pengelolaan keuangan yang jujur dan dapat dipertanggungjawabkan, serta perlindungan terhadap aset yang dimiliki organisasi.

2.1.4.2 Faktor Sistem Pengendalian Intern

Menurut Samanto dan Setyaningsih (2020), terdapat beberapa faktor yang memengaruhi pengendalian intern, antara lain:

1. **Efektivitas Pengendalian Internal:** Pengendalian internal yang berjalan dengan baik mampu menurunkan potensi terjadinya kecurangan dalam akuntansi. Dalam penelitian ini, efektivitas pengendalian internal diukur melalui lima indikator utama, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, sistem informasi dan komunikasi, serta proses pemantauan.
2. **Pengawasan dari Pimpinan:** Peran pengawasan yang dilakukan oleh atasan atau manajer sangat penting dalam menekan peluang terjadinya kecurangan. Sistem pengendalian yang kuat disertai dengan pengawasan yang intensif dapat meminimalkan risiko penyimpangan dalam penyusunan laporan keuangan.

Menurut Oktaviane dan Pohan (2022), terdapat beberapa faktor yang memengaruhi efektivitas pengendalian intern, di antaranya:

1. **Keteladanan Pimpinan:** Aspek ini merujuk pada perilaku dan sikap pimpinan dalam organisasi. Seorang atasan yang mampu menjadi teladan akan memperkuat pelaksanaan pengendalian internal dengan cara mematuhi peraturan yang berlaku serta memberikan contoh positif bagi seluruh karyawan.

2. **Mutu Pengawasan:** Pengawasan yang berkualitas memiliki peran penting dalam memastikan bahwa seluruh kebijakan dan prosedur dalam sistem pengendalian internal dijalankan secara efektif. Sebaliknya, lemahnya pengawasan dapat meningkatkan risiko terjadinya penyimpangan atau kecurangan.
3. **Kejelasan Sistem Pengendalian:** Pengendalian internal yang efektif membutuhkan sistem yang tersusun secara jelas dan sistematis. Oleh karena itu, seluruh prosedur dan kebijakan yang ditetapkan harus diterapkan secara konsisten oleh seluruh elemen dalam organisasi.

Menurut Fadhila dan Husna (2024), terdapat beberapa faktor yang memengaruhi pengendalian intern, antara lain:

1. **Sistem Informasi Akuntansi:** Berfungsi untuk memastikan bahwa pencatatan setiap transaksi dilakukan secara tepat dan akurat, sehingga mampu meminimalisir kesalahan serta mempercepat proses identifikasi terhadap tindakan kecurangan.
2. **Sumber Daya Manusia dan Teknologi Informasi:** Ketepatan kerja karyawan yang didukung oleh pemanfaatan teknologi yang sesuai akan meningkatkan efisiensi operasional dan menurunkan kemungkinan terjadinya kesalahan akibat faktor manusia.
3. **Pengelolaan Penerimaan Kas:** Transparansi dalam pencatatan transaksi kas sangat penting untuk mencegah praktik kecurangan serta menjaga agar kondisi keuangan perusahaan tetap dalam kendali.

4. **Kebijakan dan Prosedur Manajemen:** Penerapan aturan yang jelas dan terstruktur dalam proses pencatatan serta pelaporan keuangan mendukung konsistensi operasional dan memastikan kepatuhan terhadap standar internal organisasi.
5. **Efektivitas dan Efisiensi Operasional:** Sistem pengendalian internal yang berjalan optimal mampu membantu organisasi dalam memaksimalkan pemanfaatan sumber daya, mengurangi pemborosan, serta meningkatkan tingkat produktivitas.
6. **Deteksi dan Pencegahan Kecurangan:** Adanya sistem yang tertata dengan baik memudahkan pelaksanaan audit internal, verifikasi setiap transaksi, serta menjadi alat penting dalam mencegah manipulasi terhadap laporan keuangan.

2.1.4.3 Indikator Sistem Pengendalian Intern

Menurut Communittee Of Sponsoring Organization Of The Threadway Commission (COSO) pengendalian internal terdiri dari komponen yaitu:

1. **Lingkungan Pengendalian (*control environment*)**

Lingkungan pengendalian mencerminkan kondisi organisasi yang mencakup pandangan dan perilaku manajemen serta karyawan terhadap pentingnya sistem pengendalian yang diterapkan. Faktor-faktor yang memengaruhi lingkungan ini antara lain filosofi manajemen baik yang bersifat individual dalam bentuk persekutuan maupun kolektif dalam bentuk perseroan gaya operasional manajemen, struktur organisasi, serta kebijakan dan praktik sumber daya manusia. Lingkungan pengendalian memiliki peran krusial karena menjadi landasan utama bagi efektivitas

komponen-komponen lain dalam sistem pengendalian internal. Aspek ini mencakup sikap manajerial di seluruh tingkatan, prinsip-prinsip pengendalian yang diterapkan, serta nilai-nilai seperti etika, kompetensi, integritas, dan perhatian terhadap kesejahteraan sosial.

2. Penilaian Risiko (*Risk Assessment*)

Manajemen perlu memiliki kemampuan untuk mengenali berbagai risiko yang mungkin dihadapi oleh perusahaan. Setelah risiko tersebut teridentifikasi, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis dan evaluasi untuk menilai tingkat risiko serta menentukan langkah-langkah yang tepat guna mengurangi dampaknya secara efektif.

3. Prosedur Pengendalian

Prosedur pengendalian mencakup berbagai langkah dan mekanisme yang diterapkan oleh manajemen untuk mengawasi dan mengendalikan aktivitas operasional perusahaan. Langkah-langkah ini meliputi:

- a) Penempatan personel yang memiliki kompetensi yang sesuai, serta pelaksanaan rotasi jabatan dan kewajiban cuti untuk mencegah penyimpangan.
- b) Pendelegasian tanggung jawab secara jelas kepada pihak yang berwenang.
- c) Pemisahan tanggung jawab antar aktivitas yang saling berkaitan untuk mencegah konflik kepentingan atau kesalahan.
- d) Pemisahan fungsi antara pencatatan akuntansi, pengelolaan aset, dan kegiatan operasional untuk menjaga integritas sistem keuangan.

4. Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi berperan penting dalam mendukung sistem pengendalian internal yang efektif. Data dan informasi yang berkaitan dengan komponen pengendalian seperti lingkungan pengendalian, penilaian risiko, prosedur pengendalian, serta kegiatan pemantauan harus tersampaikan secara jelas dan tepat waktu kepada manajemen. Hal ini membantu dalam pengambilan keputusan operasional dan memastikan perusahaan tetap patuh terhadap peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku.

5. Pemantauan (*Monitoring*)

Pemantauan atas sistem pengendalian intern bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan serta meningkatkan efektivitas sistem tersebut. Evaluasi dapat dilakukan secara khusus melalui audit internal, atau sebagai bagian dari kegiatan rutin manajemen. Pemantauan juga bisa dilakukan dengan mengamati perilaku pegawai atau mendeteksi indikator peringatan dini dari sistem akuntansi, guna mendeteksi potensi masalah sejak dini.

2.2 Penelitian Terdahulu

Untuk memberikan kejelasan mengenai penelitian yang dilakukan maka berikut penelitian terdahulu, sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahuu

| No | Nama Peneliti | Judul | Hasil Penelitian |
|----|----------------------------|--|---|
| 1. | Dicky Surya Diputra (2024) | Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Hasil penelitian diperoleh hasil bahwa variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Medan. |
| 2. | Haria Saputr,ddk (2023) | Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kuliatas Laporan Keuangan Perusahaan Jasa di Jakarta Utara | Penelitian ini menunjukkan jika terdapat pengaruh yang signifikan antara penerapan sistem informasi akuntansi terhadap kualitaslaporan keuangan. Hasil ini dapat diterima berdasarkan output olah data regresi linear berganda dimana pada Model Summary diperoleh nilai R(korelasi) sebesar 0,778 hal ini berarti bahwa berarti bahwa sistem informasi akuntansi memiliki pengaruh sebesar 77,8% terhadap kualitas laporan keuangan. |

| | | | |
|----|--|---|---|
| 3. | Diyah Pratiwi (2023) | Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Sistem Informasi Akuntansi Dan Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal, sistem informasi akuntansi, dan sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan desa. |
| 4. | Annisa Febrianty Milenia, Jojor Lisbet Sibarani, Akmal Hidayat (2022) | Analisis Efektivitas dan Efisiensi Realisasi Anggaran sebagai Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, rasio efektivitas Kabupaten/Kota di seluruh Sumatera Utara tahun 2015 – 2019 memiliki rata - rata kategori efektif hal ini menunjukkan bahwa kemampuan daerah dalam pengelolaan keuangan adalah baik, sedangkan rasio efisiensi Kabupaten/Kota di seluruh Sumatera Utara tahun 2015 – 2019 memiliki rata – rata kategori sangat efisien hal ini menunjukkan bahwa kemampuan daerah dalam pengelolaan keuangan adalah baik. |
| 5. | A.N.J. Dien., J. Tinangon., S. Walandouw (2015) | Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung | Hasil penelitian diperoleh bahwa tingkat dan kriteria efektivitas penerimaan PAD di Dinas Pendapatan Kota Bitung Tahun Anggaran 2009-2013 sangat efektif, namun tingkat dan kriteria efisiensi anggaran belanja secara keseluruhan kurang efisien dikarenakan penggunaan anggaran belanja yang terlalu tinggi. Diharapkan pimpinan Dinas Pendapatan Kota Bitung lebih mengoptimalkan semua sumber daya yang ada untuk memperbaiki pengelolaan dalam penggunaan anggaran belanja agar lebih ditingkatkan efisiensinya. |

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka berpikir atau kerangka pemikiran merupakan fondasi pemikiran dalam suatu penelitian yang dihasilkan dari penggabungan fakta-fakta, observasi, dan kajian pustaka. Oleh karena itu, kerangka berpikir mencakup teori, prinsip, atau konsep-konsep yang akan digunakan sebagai dasar dalam penelitian. Dalam kerangka pemikiran, variabel-variabel penelitian dijelaskan secara rinci dan relevan dengan isu yang diteliti, sehingga dapat berfungsi sebagai landasan untuk menjawab permasalahan penelitian (Zahra Syahputri et al., 2023).

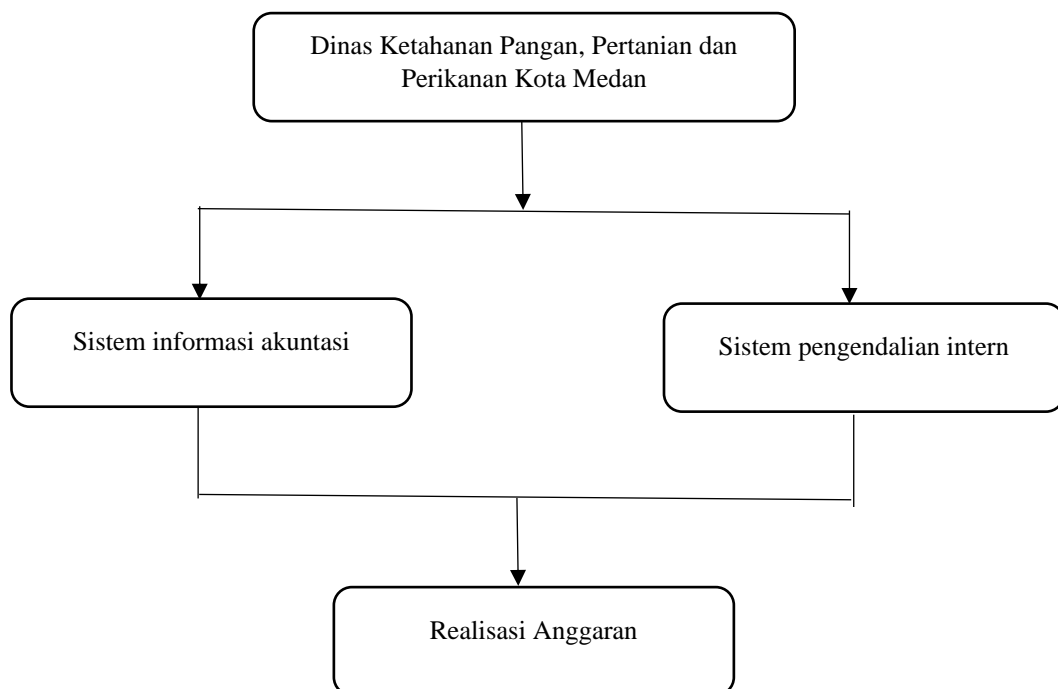
Kerangka konseptual pada penelitian ini menggambarkan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen yang diteliti pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Pengendalian Intern, sedangkan variabel dependen adalah Realisasi Anggaran.

Menurut Romney dan Steinbart (2018), sistem informasi akuntansi merupakan sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan mengolah data untuk menghasilkan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan. Menurut peneliti, penerapan sistem informasi akuntansi yang baik akan membantu instansi pemerintah dalam menyajikan informasi keuangan yang akurat dan tepat waktu, sehingga proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran dapat berjalan secara efektif dan berdampak pada peningkatan realisasi anggaran.

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO, 2013), sistem pengendalian intern adalah suatu proses yang dirancang

untuk memberikan keyakinan memadai mengenai pencapaian tujuan organisasi yang meliputi efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Sistem pengendalian intern yang efektif akan meminimalkan terjadinya penyimpangan dan kesalahan dalam pengelolaan anggaran, sehingga realisasi anggaran dapat tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Mardiasmo (2018), realisasi anggaran merupakan gambaran dari pelaksanaan anggaran yang menunjukkan sejauh mana anggaran yang telah ditetapkan dapat digunakan secara efektif dan efisien. Menurut peneliti, tingkat realisasi anggaran yang baik mencerminkan keberhasilan instansi dalam mengelola keuangan daerah secara akuntabel dan bertanggung jawab.



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan atau menguraikan bagaimana pengaruh bebas terhadap variabel tidak bebas dalam penelitian ini (Pitaloka, 2017). Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat populasi tertentu atau daerah tertentu (Nawawi, 2012). Pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dianggap oleh individu atau kelompok sebagai berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan (Creswell, 2014).

3.2 Definisi Operasional

Definisi Operasional merupakan penjabaran yang menjelaskan setiap variabel secara rinci, dengan tujuan untuk memberikan makna yang jelas atau menetapkan batasan spesifik dari variabel tersebut (Dewi et al., 2019). Definisi operasional merupakan pendekatan untuk merumuskan dan menetapkan bagaimana suatu variabel akan diukur secara singkat, jelas, dan bebas dari ambiguitas. Dengan demikian, makna dari variabel menjadi lebih konkret dan dapat diamati atau diukur secara nyata. Tujuan utama dari definisi ini adalah untuk memberikan kejelasan terhadap batasan variabel, menyamakan persepsi antar peneliti, serta mendukung kelancaran pelaksanaan proses penelitian. Penerapan definisi operasional sangat penting agar setiap variabel dapat diukur secara konsisten dan menghasilkan data yang valid Kamiruddin Abdullah et al. (2022).

1. Sistem Informasi Akuntansi

Sistem Informasi Akuntansi merupakan jaringan dari seluruh prosedur, formulir-formulir, catatan-catatan, dan alat-alat yang digunakan untuk mengelolah data keuangan menjadi suatu bentuk laporan yang akan digunakan oleh pihak manajemen dalam mengendalikan kegiatan usahanya dan selanjutnya digunakan sebagai alat pengambilan keputusan manajemen.

2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Sistem pengendalian intern (SPI) adalah keseluruhan rencana, metode, dan prosedur yang disusun oleh manajemen untuk mengendalikan kegiatan organisasi agar berjalan dengan baik dan sesuai tujuan. SPI tidak hanya berbentuk aturan tertulis, tetapi juga mencakup cara kerja, pembagian tugas, kebiasaan kerja, serta pengawasan dalam organisasi.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai pemerintah untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan.

3. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran adalah pelaksanaan dari anggaran yang telah direncanakan dan disahkan, yaitu menunjukkan berapa besar dana yang benar-benar digunakan untuk membiayai kegiatan atau program dalam suatu periode tertentu.

Realisasi anggaran digunakan untuk menilai apakah pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai rencana, apakah penggunaan dana efektif dan efisien, serta apakah masih terdapat sisa anggaran atau kekurangan anggaran. Dalam pemerintahan,

3.4 Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang didasarkan pada paradigma postpositivisme, yang mengutamakan pola pikir induktif dan menghasilkan data dalam bentuk deskriptif. Metode ini tidak menggunakan prosedur statistik, melainkan berfokus pada penarikan makna yang mendalam dari sejumlah generalisasi (Sugiyono, 2018).

b. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh oleh peneliti adalah sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data primer, yaitu data yang dikumpulkan secara langsung dari pihak pertama atau sumber asli. Data primer diperoleh secara langsung oleh peneliti dengan tujuan khusus untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian (Tanjung Hasrudi et al., 2014).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data di mana peneliti mengajukan pertanyaan yang relevan dengan topik penelitian secara langsung kepada informan. Dalam hal ini, peneliti melakukan

wawancara dengan salah satu pegawai di Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Medan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

2. Studi Dokumentasi

Peneliti memperoleh data melalui dokumen-dokumen yang disediakan oleh instansi terkait, seperti laporan keuangan dan data lain yang relevan dengan topik penelitian. Dokumen-dokumen ini digunakan sebagai sumber informasi tambahan guna memperkuat analisis dan pembahasan, dengan cara dikaji dan dipelajari secara mendalam.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis data deskriptif kualitatif, yaitu metode pengolahan data yang bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh dan terperinci mengenai suatu fenomena atau kejadian, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode ini berfokus pada pengalihan makna, interpretasi, dan pemahaman mendalam terhadap data yang bersifat naratif atau deskriptif.

Adapun langkah-langkah dalam analisis data deskriptif kualitatif sebagai berikut:

1. Reduksi data: Memilih, memfokuskan, menyederhanakan, dan mengorganisasi data mentah yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.

2. Penyajian data: Menyusun informasi yang telah direduksi dalam bentuk yang sistematis agar mudah dipahami dan dianalisis lebih lanjut.
3. Penarikan kesimpulan: Penulis menarik kesimpulan sementara berdasarkan data yang didapat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan merupakan instansi pemerintah daerah yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan sektor pangan, pertanian, dan perikanan. Instansi ini berperan dalam menyusun kebijakan, melaksanakan program, serta melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang berkaitan dengan ketahanan pangan daerah.

Dalam menjalankan aktivitasnya, instansi ini memanfaatkan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh karena itu, pengelolaan keuangan menjadi aspek yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan program kerja yang telah direncanakan.

Untuk menunjang pengelolaan keuangan tersebut, instansi ini telah menerapkan beberapa sistem, yaitu:

- 1) Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai sistem informasi akuntansi.
- 2) Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman kerja.
- 3) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagai mekanisme pengawasan

Ketiga komponen tersebut seharusnya saling terintegrasi untuk menciptakan pengelolaan keuangan yang efektif, transparan, dan

akuntabel. Namun, berdasarkan kondisi di lapangan, implementasi dari ketiga sistem tersebut masih belum berjalan secara optimal.

4.1.2 Data Realisasi Anggaran

| Tahun | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Selisih (Rp) | Persentase |
|--------------|----------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|
| 2022 | 40.339.236.896 | 37.539.990.220 | 2.799.246.676 | 93,06 % |
| 2023 | 824.128.969 | 42.245.818.200 | (41.421.689.231) | 51,26 % |
| 2024 | 37.571.153.480 | 36.491.566.040 | 1.079.587.440 | 97,13 % |

Tabel 4.1 Data Realisasi Anggaran

Pada tahun 2022, tingkat realisasi anggaran mencapai 93,06%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran yang direncanakan telah dapat direalisasikan dengan baik. Selisih yang terjadi masih tergolong wajar dan menunjukkan adanya efisiensi dalam penggunaan anggaran.

Namun, pada tahun 2023 terjadi ketidaksesuaian yang sangat signifikan antara anggaran dan realisasi. Anggaran yang ditetapkan relatif kecil, namun realisasi justru sangat besar. Kondisi ini mengindikasikan adanya permasalahan dalam perencanaan anggaran atau adanya perubahan anggaran yang tidak terkontrol selama pelaksanaan.

Pada tahun 2024, realisasi anggaran kembali menunjukkan kondisi yang stabil dengan persentase sebesar 97,13%. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan dalam proses pengelolaan anggaran dibandingkan tahun sebelumnya.

4.1.3 Hasil Wawancara dan Observasi

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, di peroleh beberapa temuan terkait kondisi sistem yang digunakan dalam pengelolaan keuangan.

| No | Aspek | Temuan | Dampak |
|----|---------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1 | Sistem SIPD | Sering mengalami gangguan | Proses kerja terhambat |
| 2 | Pembayaran gaji | Terjadi keterlambatan | Menurun kinerja pegawai |
| 3 | SOP | Tidak dijalankan konsisten | Proses tidak standar |
| 4 | Pengendalian Intern | Kurang optimal | Risiko kesalahan tinggi |

Tabel 4.2 Hasil wawancara dan Observasi

4.2 Analisis Data

4.2.1 Realisasi Anggaran

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, realisasi anggaran pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan selama periode 2022 hingga 2024 memperlihatkan adanya variasi yang cukup mencolok dari tahun ke tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran belum sepenuhnya berjalan secara stabil dan konsisten.

Pada tahun 2022, tingkat realisasi anggaran tercatat sebesar 93,06%. Persentase ini mengindikasikan bahwa sebagian besar anggaran yang telah direncanakan berhasil direalisasikan dengan baik. Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, angka tersebut dapat dikategorikan sebagai pencapaian yang cukup efektif, karena menunjukkan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan kegiatan.

Namun, pada tahun 2023 terjadi perbedaan yang sangat signifikan antara anggaran dan realisasi. Realisasi anggaran mencapai angka yang jauh melampaui perencanaan, yaitu sebesar 51,26%. Secara analitis, kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Hal tersebut dapat disebabkan oleh perubahan anggaran yang tidak terkendali, kesalahan dalam penetapan anggaran awal, atau lemahnya pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan.

Dalam konsep pengelolaan keuangan publik, realisasi anggaran berfungsi sebagai alat evaluasi untuk menilai kesesuaian antara rencana dan implementasi. Jika terjadi selisih yang terlalu besar, maka hal tersebut mencerminkan bahwa perencanaan belum dilakukan secara akurat serta tidak didukung oleh sistem pengendalian yang memadai.

Pada tahun 2024, realisasi anggaran kembali menunjukkan kondisi yang lebih stabil dengan persentase sebesar 97,13%. Hal ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam proses penyusunan dan pelaksanaan anggaran. Tingkat realisasi yang tinggi mencerminkan

bahwa perencanaan yang dilakukan lebih realistis dan sesuai dengan kebutuhan instansi.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa realisasi anggaran pada instansi ini belum menunjukkan kestabilan, sehingga masih diperlukan perbaikan dalam aspek perencanaan dan pengendalian agar pelaksanaan anggaran dapat berjalan lebih efektif.

4.2.2 Sistem Informasi Akuntansi

Sistem informasi akuntansi dalam penelitian ini diwujudkan melalui penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), yang berfungsi sebagai alat dalam mengelola data keuangan serta mendukung proses pengambilan keputusan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa penggunaan SIPD telah memberikan kemudahan dalam pengolahan data keuangan, khususnya dalam pencatatan transaksi dan penyusunan laporan. Sistem ini memungkinkan data keuangan diproses secara lebih terintegrasi sehingga dapat meningkatkan efisiensi kerja.

Meskipun demikian, dalam penerapannya masih ditemukan berbagai kendala yang menghambat kinerja sistem. Permasalahan yang sering terjadi meliputi gangguan pada server, lambatnya akses sistem, serta keterbatasan dalam penggunaan aplikasi. Kondisi ini menyebabkan proses pengolahan data menjadi tidak optimal.

Secara teoritis, sistem informasi akuntansi memiliki peran penting dalam menyediakan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang akurat, relevan, dan tersedia tepat waktu. Informasi tersebut menjadi

dasar dalam pengambilan keputusan manajemen serta mendukung pengendalian organisasi.

Dalam penelitian ini, kendala yang terjadi pada SIPD mengakibatkan informasi yang dihasilkan menjadi kurang optimal, baik dari segi ketepatan waktu maupun keakuratannya. Hal ini berpotensi menghambat proses pengambilan keputusan serta menurunkan efektivitas pengelolaan keuangan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi telah diterapkan, namun masih perlu ditingkatkan terutama pada aspek teknis dan infrastruktur agar dapat berfungsi secara maksimal.

4.2.3 Sistem Pengendalian Intern

Sistem pengendalian intern dalam penelitian ini berperan sebagai mekanisme yang memastikan bahwa seluruh kegiatan pengelolaan keuangan dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil analisis, penerapan sistem pengendalian intern pada instansi ini masih belum berjalan secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari beberapa permasalahan yang terjadi, seperti keterlambatan dalam pembayaran gaji, kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan SOP, serta lemahnya proses verifikasi dokumen.

Dalam kerangka Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), terdapat lima unsur utama yang harus diterapkan, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Dari kelima unsur tersebut, kelemahan

yang paling menonjol dalam penelitian ini terdapat pada aspek pemantauan.

Kurangnya kegiatan pemantauan menyebabkan berbagai kesalahan dan penyimpangan tidak dapat terdeteksi secara dini. Selain itu, tidak adanya evaluasi secara berkala juga menyebabkan permasalahan yang terjadi tidak segera diperbaiki.

Secara teoritis, sistem pengendalian intern memiliki tujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional, menjaga keandalan laporan keuangan, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, jika sistem pengendalian tidak berjalan dengan baik, maka akan meningkatkan risiko terjadinya kesalahan dan ketidakefisienan dalam pengelolaan keuangan.

Dalam penelitian ini, lemahnya pengendalian intern terbukti memberikan dampak terhadap pelaksanaan anggaran, terutama dalam bentuk keterlambatan dan ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Peran Sistem Informasi Akuntansi Pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, sistem informasi akuntansi pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam proses realisasi anggaran. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai sarana dalam mengelola data keuangan secara terintegrasi. Namun,

dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai kendala teknis seperti gangguan sistem, server error, serta akses yang lambat sehingga menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi akuntansi belum berjalan secara optimal.

Secara teoritis, sistem informasi akuntansi merupakan sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, mencatat, dan mengolah data keuangan menjadi informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan. Menurut Mulyadi (2016), sistem informasi akuntansi merupakan organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dirancang untuk menyediakan informasi keuangan bagi manajemen. Sejalan dengan itu, Romney dan Steinbart (2018) menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi berfungsi untuk menghasilkan informasi yang relevan dan andal dalam mendukung pengambilan keputusan. Selain itu, Krismiaji (2015) juga menegaskan bahwa sistem informasi akuntansi berperan dalam mendukung perencanaan, pengendalian, dan operasional organisasi secara keseluruhan.

Dalam konteks sistem informasi, Jogiyanto Hartono (2017) menjelaskan bahwa sistem informasi merupakan kombinasi antara teknologi dan sumber daya manusia yang saling berinteraksi untuk mendukung kegiatan organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan SIPD tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kemampuan sumber daya manusia dalam mengoperasikannya. Selanjutnya, Azhar Susanto (2013) menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi terdiri dari berbagai komponen seperti manusia, prosedur, data, dan teknologi yang saling

terintegrasi. Oleh karena itu, jika salah satu komponen tidak berjalan dengan baik, maka kinerja sistem secara keseluruhan akan terganggu.

Dalam kaitannya dengan realisasi anggaran, sistem informasi akuntansi memiliki peran dalam mencatat transaksi keuangan serta menghasilkan laporan realisasi anggaran (LRA). Laporan ini digunakan untuk membandingkan antara anggaran yang telah ditetapkan dengan realisasi yang terjadi, sehingga dapat digunakan sebagai alat evaluasi kinerja keuangan. Hal ini sejalan dengan pendapat Bodnar dan Hopwood (2014) yang menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi berfungsi sebagai alat pengendalian dan penyedia informasi bagi manajemen.

Namun, berdasarkan hasil penelitian, peran sistem informasi akuntansi pada dinas tersebut belum sepenuhnya optimal. Hal ini terlihat dari adanya ketidaksesuaian antara anggaran dan realisasi, khususnya pada tahun 2023 dimana realisasi anggaran jauh melebihi anggaran yang telah ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi belum mampu mendukung fungsi pengendalian secara maksimal. Menurut teori, sistem informasi akuntansi seharusnya dapat membantu dalam memonitor dan mengendalikan penggunaan anggaran agar tetap sesuai dengan rencana. Berdasarkan hasil penelitian, sistem informasi akuntansi pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Medan sudah berperan dalam mendukung pengelolaan keuangan dan realisasi anggaran, namun belum optimal karena masih terdapat kendala teknis seperti gangguan pada sistem SIPD.

Menurut Mulyadi, sistem informasi akuntansi berfungsi untuk mengolah data keuangan menjadi informasi yang akurat guna mendukung pengambilan keputusan. Jika sistem berjalan baik, maka realisasi anggaran juga akan lebih efektif.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Haria Saputra dkk (2023) dan Dicky Surya Diputra (2024) yang menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Dapat disimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pengelolaan keuangan dan realisasi anggaran pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan. Namun, masih terdapat beberapa kendala dalam penerapannya, sehingga perlu dilakukan peningkatan baik dari sisi teknologi maupun sumber daya manusia agar sistem dapat berjalan lebih efektif dan optimal.

4.3.2 Sistem Pengendalian Intern Khusus SOP pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan

Berdasarkan hasil penelitian, sistem pengendalian intern pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan belum berjalan secara optimal, khususnya dalam penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP). Meskipun SOP telah tersedia sebagai pedoman kerja, namun pelaksanaannya belum didukung oleh sistem pengendalian intern yang kuat, sehingga SOP tidak berjalan secara efektif. Hal ini dapat dilihat dari adanya keterlambatan dalam pembayaran gaji pegawai, kesalahan dalam verifikasi dokumen, serta kurangnya pengawasan dalam pelaksanaan prosedur.

Secara teoritis, sistem pengendalian intern merupakan suatu proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai dalam mencapai tujuan organisasi. Menurut Mulyadi (2016), sistem pengendalian intern bertujuan untuk menjamin keandalan laporan keuangan, efektivitas operasional, serta kepatuhan terhadap peraturan. Hal ini diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah terdiri dari lima unsur utama, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan.

Selain itu, menurut COSO (2013), sistem pengendalian intern merupakan suatu proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Sejalan dengan itu, Mardiasmo (2017) menyatakan bahwa pengendalian intern berfungsi untuk menjaga aset, memastikan keandalan laporan keuangan, serta meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan yang berlaku. Selanjutnya, Rai (2008) menegaskan bahwa pengendalian intern merupakan serangkaian kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memastikan tercapainya tujuan organisasi.

Dalam praktiknya, SOP merupakan bagian dari kegiatan pengendalian yang berfungsi sebagai pedoman teknis dalam menjalankan aktivitas organisasi. Menurut Hery (2016), SOP merupakan prosedur yang dirancang untuk menjamin efisiensi operasional dan keakuratan data. Selain itu, Tugiman (2014) menyatakan bahwa pengendalian intern yang efektif harus didukung oleh prosedur kerja yang jelas serta pengawasan yang

berkelanjutan. Hal ini juga diperkuat oleh Arens (2015) yang menyatakan bahwa pengendalian intern bertujuan untuk mengurangi risiko kesalahan dan kecurangan melalui penerapan prosedur yang tepat.

Berdasarkan hasil penelitian, kelemahan utama terletak pada unsur pemantauan dalam sistem pengendalian intern. Pemantauan belum dilakukan secara optimal sehingga berbagai permasalahan seperti keterlambatan pembayaran gaji dan kesalahan administrasi tidak dapat segera diatasi, berdasarkan hasil penelitian, sistem pengendalian intern khususnya SOP belum berjalan optimal karena kurangnya pengawasan dan pemantauan, sehingga masih terjadi keterlambatan dan kesalahan dalam proses administrasi.

Menurut PP No. 60 Tahun 2008, sistem pengendalian intern bertujuan untuk memastikan kegiatan berjalan efektif, efisien, dan sesuai aturan. Tanpa pengawasan yang baik, SOP tidak dapat berjalan maksimal.

Hasil ini didukung oleh penelitian Diyah Pratiwi (2023) dan Dicky Surya Diputra (2024) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas pengelolaan keuangan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian intern terhadap realisasi anggaran pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem informasi akuntansi yang diterapkan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pengelolaan keuangan, khususnya dalam proses realisasi anggaran. Sistem ini membantu dalam pencatatan, pengolahan, dan pelaporan data keuangan secara terintegrasi sehingga dapat menghasilkan informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kendala seperti gangguan sistem, server error, serta akses yang lambat. Hal tersebut menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi akuntansi belum berjalan secara optimal.
2. Sistem pengendalian intern khususnya melalui penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) belum berjalan secara optimal. Meskipun SOP telah tersedia sebagai pedoman kerja, namun pelaksanaannya belum konsisten dan belum didukung oleh pengawasan yang memadai. Hal ini terlihat dari adanya keterlambatan pembayaran gaji, kesalahan dalam verifikasi dokumen, serta lemahnya fungsi pemantauan dalam sistem pengendalian intern.

A. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Instansi diharapkan dapat meningkatkan kualitas penerapan sistem informasi akuntansi melalui optimalisasi penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), baik dari segi teknologi maupun sumber daya manusia. Perbaikan perlu difokuskan pada kendala teknis seperti gangguan sistem dan akses yang lambat, serta peningkatan kompetensi pegawai melalui pelatihan. Secara kebijakan, instansi disarankan untuk menerapkan perencanaan anggaran berbasis data (data-driven budgeting) dan meningkatkan dukungan infrastruktur teknologi agar sistem dapat berjalan lebih efektif dalam mendukung realisasi anggaran.
2. instansi perlu memperkuat sistem pengendalian intern khususnya dalam penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) agar berjalan secara konsisten dan efektif. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan pengawasan, pemantauan berkala, serta penerapan prosedur kerja yang lebih disiplin. Secara kebijakan, perlu adanya penegasan standar pengawasan internal, digitalisasi SOP, serta evaluasi rutin sebagai dasar pengambilan keputusan guna meminimalisir kesalahan dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir. (2018). Peranan brainware dalam sistem informasi manajemen jurnal ekonomi dan manajemen sistem informasi. *Sistem Informasi*, 1(September), 60–69. <https://doi.org/10.31933/JEMSI>
- Angel Siti Fatimah, A., & Aini Rahmah, N. (2022). Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan. *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, 1(3), 419–438. <https://doi.org/10.36418/jcs.v1i3.66>
- Anna M & dwi. (2011). *Faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi dan pengembalian KUR*. 4(4), 101–110.
- Arafani, S. S., & Usman Sastradipraja. (2025). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Kota Bandung. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 8(3), 3539–3550. <https://doi.org/10.31539/costing.v8i3.14131>
- Azhar, Susanto. (2008). *Sistem Informasi Akuntansi*. Bandung: Lingga Jaya.
- Bastian, I. (2014). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Erlangga.
- Bengkulu, U., Limun, K., & Bangkahulu, M. (2019). *Universitas Bengkulu, Jl. WR. Supratman, Kandang Limun, Muara Bangkahulu, Bengkulu. September*, 131–140.
- Christina Kurnia Agatha, M. 2018. (2018). 411-821-1-Sm. *Analisis Sistem Informasi Akuntansi Atas Penggajian Dan Pengupahan Pada Pt. Batik Arjuna Cemerlang Sukoharjo*, 5(2), 7–19.
- Dahrani, Saragih, F., & Ritonga, P. (2022). Model Pengelolaan Keuangan Berbasis Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan : Studi pada UMKM di Kota Binjai. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*.
- Dewi, Endiana, I. D. M., & Arizona, I. P. E. (2019). Pengaruh Rasio Likuiditas, Rasio Leverage dan Rasio Profitabilitas Terhadap Financial Distress Pada Perusahaan Manufaktur. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(November), 1689–1699.
- Dien, A. N. J., Tinangon, J., & Walandouw, S. (2015). Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung. *Jurnal EMBA*, 3(1), 534–541.
- Dona, E. M., & Lestari, V. A. (2020). Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Oku. *Balance: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 5(2), 135. <https://doi.org/10.32502/jab.v5i2.2877>
- Hardiyanti, A., Kapa, S., & Ismail, N. (2022). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi, Tingkat Kepuasan Kerja, Budaya Organisasi, Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan. *Jurnal Riset Ilmu Akuntansi*, 1(2), 54–62. <https://doi.org/10.37478/jria.v1i2.1178>

- Heinrich, A., & Probohudono, A. N. (2023). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *KONSTELASI: Konvergensi Teknologi Dan Sistem Informasi*, 3(2), 411–424. <https://doi.org/10.24002/konstelasi.v3i2.7150>
- Lestari, V. D. (2023). Implementasi Efektifitas Pengendalian Intern pada Sistem Informasi Akuntansi Penggajian. *Jurnal Riset Mahasiswa Ekonomi (RITMIK)*, 5(1), 49–61.
- Lusiana, M. G., & Arfamaini, R. (2022). Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Internal atas Penjualan Kredit pada PT. Tri Tehnik Perkasa. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, 6(1), 32–49. <https://doi.org/10.31092/jmkp.v6i1.1553>
- Mulyadi. (2016). *Sistem Akuntansi*. Salemba Empat.
- Mulyanti, K. (2021). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt Iron Bird Logistics. *Land Journal*, 1(2), 187–194. <https://doi.org/10.47491/landjournal.v1i2.711>
- Paramitha, N. M. A., & Mulyadi, M. (2017). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Manajerial dan Pengambilan Keputusan Investasi di PT. Bank Negara Indonesia (BNI) 46 Cabang Denpasar. *Jurnal Ilmiah Akuntansi & Bisnis*, 2(2), 306–317.
- Pitaloka, E. (2017). Dampak Modal Intelektual Terhadap Kinerja Bank Umum Nasional Periode 2010–2015. *Jurnal Inspirasi Bisnis Dan Manajemen*, 1(2), 87. <https://doi.org/10.33603/jibm.v1i2.538>
- Prasetyo, W. H., & Nugraheni, A. P. (2020). Analisis Realisasi Anggaran Belanja Dalam Rangka Mengukur Efektivitas Dan Efisiensi Penyerapan Anggaran Belanja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kota Magelang Periode 2015 – 2019. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha)*, 11(1), 1–10.
- Pujiono, D., Sukarno, H., & Puspitasari, N. (2016). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kinerja Pemerintah Daerah (Studi di Provinsi Maluku Utara). *Jurnal Bisnis Dan Manajemen, Vol. 10, N(2)*, 6881.
- Putri, T. E., Kuntadi, C., & Pramukty, R. (2023). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Pencegahan Kecurangan: Peran Audit Internal, Sistem Pengendalian Internal Dan Komitmen Organisasi. *Jurnal Economina*, 2(7), 1789–1802. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i7.674>
- Ratag, W. A., Kumenaung, A. G., & Engka, D. S. M. (2019). Pengaruh Perencanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran Di Lingkungan Universitas Sam Ratulangi. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 20(2), 1. <https://doi.org/10.35794/jpekd.23845.20.2.2019>
- Republik Indonesia. (2008). *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*.
- Romney, M. B., & Steinbart, P. J. (2018). *Accounting Information Systems*. Pearson.

- Saputri, H., Kusnaedi, U., & Asmana, Y. (2023). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Perusahaan Jasa di Jakarta Utara. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Volume 1,(4)*, 102–109.
- Sari, M., Artina, N., Dhia Wenny, C., Mdp, S., & Akuntansi, J. (2021). Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pada Kantor Camat Seberang Ulu Ii Palembang. *Core.Ac.Uk, 376400(14)*, 376360.
- Sugiyono. (2018). Analisis Data Kualitatif. *Research Gate, March*, 1–9.
- Yuniarti, Dessy Windia; Sulistiyati, Titik Dwi; Suprayitno, E. (2013). No Title9–1 ,(1)1 , آب و خاک. آبهای زیرزمینی.